

UJUNG SENJA PABRIK-PABRIK GULA DI BATAVIA AWAL ABAD KE-18

Huddy Husin

Program Studi Pendidikan Sejarah, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI
Email: hudi0212@gmail.com

ABSTRACT

Transitional forms of commodities in the international market from the beginning of spice to the sugarcane (sugar), tea, rubber and others responded by the colonial Dutch East Indies with a test and cultivation of plant species of the commodity. Sugarcane is one of the plants which are priorities for the Dutch East Indies colonial government to be managed and produced (although the number is still minimum scale), this attempt to force the colonial government to involve other communities, especially Tioghoa who have skills in managing sugarcane crop. Not only felt the sweet result of the production of sugar cane (sugar) but the journey also gives a lot of negative consequences such as criminal tendency and resistance to the colonial government conducted by the Chinese. This paper tries to explain how the effort to build industrialization of the sugar cane plant culminate in a social movement, then the direction of its development would benefit the colonial government. Through this article also hoped we can learn how the logical consequence of industrialization itself, and preparing for its development direction in order not to evolve towards a state that is destructive.

Keyword : *Sugar Factory, Batavia*

ABSTRAK

Peralihan bentuk komoditi di pasar internasional dari semula rempah-rempah menuju tanaman tebu (gula), teh, karet dan lain sebagainya direspon oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan melakukan uji coba dan pembudidayaan jenis-jenis tanaman komoditi tersebut. Tebu adalah salah satu tanaman yang menjadi prioritas bagi pemerintah kolonial Hindia-Belanda untuk dikelola dan produksi (meski dalam jumlah skala yang masih minimum), upaya ini memaksa pemerintah kolonial untuk melibatkan kelompok masyarakat lain khususnya Tioghoa yang memiliki keterampilan dalam mengelola tanaman Tebu. Tidak hanya dirasakan manis hasil dari produksi tebu (gula) akan tetapi dalam perjalanannya juga memberikan banyak konsekuensi yang bertendensi negatif seperti kriminalitas dan perlawanan kepada pemerintah kolonial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa. Tulisan ini mencoba menerangkan bagaimana usaha untuk membangun industrialisasi tanaman tebu tersebut berujung pada sebuah gerakan sosial, yang kemudian arah perkembangannya justru menguntungkan pemerintah kolonial. Melalui tulisan ini pula diharapkan kita dapat belajar bagaimana konsekuensi logis dari industrialisasi itu sendiri, dan mempersiapkan arah perkembangannya agar tidak berkembang menuju keadaan yang bersifat destruktif.

Kata kunci : Pabrik Gula, Batavia

PENDAHULUAN

Beberapa barang-barang komoditi yang menjadi primadona pada awal abad ke-16 seperti rempah-rempah, kapas, beras, hasil laut dan lain sebagainya menjadi ciri khas yang memberikan identitas tersendiri bagi aktivitas perdagangan di Nusantara. Kemajuan teknologi dan peralihan kebutuhan pasar internasional terhadap barang-barang komoditi perdagangan, memberikan perubahan pula secara mendasar tentang jenis tanaman yang diproduksi di Nusantara. Rempah-rempah yang sempat menjadi primadona di pasaran internasional, perlahan demi perlahan digantikan dengan tanaman komoditi lainnya, seperti : gula, kopi, tembakau dan kopra. Hal ini secara umum terjadi pada akhir abad ke-17, di Nusantara fenomena ini ditandai dengan dimusnahkannya beberapa tanaman rempah-rempah yang berada di wilayah Nusantara bagian timur (Maluku) oleh perwakilan pemerintahan VOC.

Keberhasilan atas percobaan VOC terhadap upaya penanaman tanaman tebu, tembakau dan kopi di wilayah Jawa, menjadi titik awal bagi peralihan produksi tanaman komoditi di Nusantara. Batavia yang telah menjadi pijakan awal bagi VOC di Jawa, menjadikannya wilayah percobaan untuk memproduksi tanaman-tanaman yang laku dalam pasaran internasional. Pada tahun 1648, seorang pengusaha Belanda yang bernama Anthony Paviljoen, menyewa beberapa luas tanah yang berada di pinggiran Batavia (*Weltevreden*) dan mengusahakan pertanian dan peternakan dengan seorang China yang bernama Phoa Bing Am. Usaha mereka untuk menanam tebu dan proses pengolahan menjadi komoditi gula mencapai keberhasilan, dimana kemudian hasil-hasilnya diperjual-belikan untuk memenuhi kebutuhan gula di Batavia dan untuk kepentingan ekspor ke Negeri Induk.

Seiring dengan semakin meluasnya daerah jajahan VOC dan pemerintah kolonial Hindia-Belanda (sesudah perang Jawa), perluasan daerah penanaman tanaman komoditi tebu semakin luas. Hal tersebut juga diiringi pula kesuksesan dan keuntungan yang besar hasil penjualan gula di pasar internasional oleh pemerintah Hindia-Belanda. Pembangunan pusat-pusat industri baru mulai dibuka di beberapa wilayah lain yang berada jauh dari wilayah Batavia, seperti Bandung, Cirebon, hingga ke wilayah Jawa

Tengah (Surakarta dan Yogyakarta). Dengan dibentuknya wilayah-wilayah industri perkebunan baru tersebut, maka beberapa pabrik-pabrik awal yang menjadi perintis awal bagi perusahaan tebu dan gula di Batavia, berangsur-angsur mulai menghilang dan berpindah. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang menetapkan Batavia hanya sebagai pusat perniagaan, pusat pemukiman orang-orang Eropa dan pusat pemerintahan, bukan sebagai wilayah Industri.

Berpindahnya areal industri perkebunan di Batavia, secara umum berlangsung pada awal abad ke-18, setelah momentum berakhirnya Perang Jawa, dan setelah perjanjian *gijanti* (yang memisahkan dua kerajaan besar di Jawa Tengah, Surakarta dan Yogyakarta). Pembahasan mengenai masa akhir keberadaan pabrik-pabrik gula di Batavia dipandang sangat menarik, hal ini didasarkan atas : pertama, hilang dan berpindahnya pabrik-pabrik gula di Batavia merupakan sebuah fenomena tersendiri yang berlaku dalam hukum-hukum sosiologi perkotaan. Naik dan berkembangnya aktivitas sosial-ekonomi sebuah masyarakat dalam wilayah tertentu, akan memberikan dampak pada penyusunan ulang beberapa kelengkapan infrastruktur kota, yang diorientasikan kepada kebutuhan hidup penduduk di wilayah tersebut.

Kedua, persoalan mengenai berpindahnya pabrik-pabrik gula di pinggiran Batavia, dalam diskursus sejarah juga ditandai dengan kemampuan atau adaptasinya manusia terhadap ekologi yang mengitari dirinya. Hal tersebut dijelaskan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya yang berjudul *Budaya dan Masyarakat*. Masyarakat memiliki kemampuan dalam mengelola dan beradaptasi terhadap lingkungan hidupnya (lingkungan, fisik, lingkungan alam dan lingkungan simbolik). Ketiga, persoalan mengenai tata-kelola lingkungan dan ekologi sebuah kota merupakan persoalan yang cukup menarik ditinjau melalui ilmu sejarah, karena akan dilihat segi-segi yang mempengaruhinya serta dapat melihat *continuitas* dari arah perkembangannya.

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan uraian dan penjelasan mengenai perubahan morfologi kota, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat kota di Batavia (kini Jakarta). Penelitian ini juga akan mencoba untuk membuat kita untuk berfikir ulang mengenai bagaimana

seharusnya mengelola kota Jakarta kedepan, sesuai dengan takdir historisnya sebagai kota kolonial, yang menjadi pusat bagi kehidupan niaga, pemukiman dan pemerintahan.

PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Ekologi Batavia

Jakarta (dahulu Batavia) pada awalnya sebagai sebuah kota pusat perdagangan yang didirikan oleh VOC dan Pemerintah kolonial Belanda. Wilayah ini dipilih oleh Belanda karena letaknya yang strategis dalam wilayah perdagangan. Disebelah barat berdiri kerajaan Banten yang saat itu menjadi pusat perdangan dengan orang-orang atau pedagang dari pulau Sumatera. Sementara disebelah timur terdapat kerajaan Cirebon, yang menjadi salah satu wilayah perdagangan yang besar di pesisir utara pulau Jawa. Kota Batavia bersebelahan dengan Bekasi, Cakung sebagai distrik dari wilayah Jati Negara disebelah timur. Di sebelah barat Batavia berbatasan dengan wilayah Banten. Untuk sebelah selatan Batavia berbatasan dengan wilayah-wilayah seperti Depok, Bogor dan sebagian wilayah Banten sementara bagian Utara Batavia berbatasan langsung dengan laut Jawa dan Kepulauan Seribu.

Batavia masa penjajahan kolonial Belanda memiliki luas sekitar 10 sampai dengan 12 Kilometer, menurut catatan kependudukan pada awal abad ke-19 Batavia memiliki jumlah penduduk sebesar 103.513 jiwa, dengan rincian sebagai berikut Belanda \pm 1.363 jiwa Eropa lainnya \pm 5.175 jiwa, China \pm 24.000, Arab dan India \pm 100 jiwa dan orang-orang dari Nusantara (Indonesia) \pm 78.000 (Abeyasekere, 1989 : 57-65). Daerah yang paling padat jumlah penduduknya ialah sepanjang wilayah pelabuhan sunda kelapa (saat ini bernama Muara Angke/ Pasar Ikan). Berkaitan dengan kepadatan penduduk ialah keadaan penggarapan tanah, yang pada akhirnya sangat tergantung kepada lingkungan fisik. Sepanjang wilayah kota Jakarta yang secara umum berbentuk dataran-dataran rendah, dimana pada awalnya yakni masa pemerintahan kolonial Hindia –Belanda diluputi oleh areal persawahan dan perkebunan guna kepentingan ekonomi kolonial, jenis-jenis sawah yang dapat dijumpai ialah sawah tadah hujan yang bergantung pada musim. Daerah-daerah yang menjadi sentral daerah industri pertanian

dan perkebunan ada disepanjang selatan dan sebelah timur wilayah Batavia. Batavia umumnya dikenal sebagai wilayah administrasi pemerintahan dari pada sebagai wilayah perindustrian dan perdagangan. Hal ini dapat dimaklumkan karena di Batavialah pusat pemerintahan kolonial Belanda saat itu, yakni dengan berdirinya kantor pusat Gubernur Jendral sebagai perwakilan dari negeri induk Belanda (saat ini kita kenal dengan museum Fatahillah).

Selain sebagai sentral kekuatan politik pemerintah kolonial Belanda, Batavia juga menjadi tempat yang strategis bagi pengembangan sektor perekonomian. Hal ini disebabkan posisinya yang berdekatan dengan daerah-daerah penghasil pertanian dan perkebunan yakni daerah-daerah *hinterland*. Depok, Bogor, Bekasi, dan daerah terluar Banten bagian barat sebagai daerah penyuplai hasil bumi. Dengan demikian Batavia dapat melakukan kontrol dan pengawasan secara langsung dan ketat terhadap daerah-daerah penghasil pertanian dan perkebunan. Berangkat dari kata kunci yakni control dan pengawasan, maka kemudian Batavia mengambil peran sebagai kota pusat administratif / pemerintahan dalam kerangka mendukung misi negeri induk Belanda yakni sebagai basis penyokong kehidupan negeri induk. Van den Bosch menggunakan konsep ini di Nusantara sebagai tempat mengambil keuntungan bagi negeri induk, atau seperti yang dikatakan Baud “*gabus tempat Nederland mengapung*”, dengan kata lain Jawa dipandang sebagai sapi perahan (Kartodirjo, 1993 : 305).

Golongan etnik yang terbesar di Batavia adalah Betawi yang kebanyakan berdiam di daerah pesisir, sementara itu orang-orang yang berasal dari Sunda mendiami daerah disebelah selatan dan orang-orang seperti dari Jawa, Sumatera, Madura, Makasar, Bali dan etnis lainnya tersebar secara merata diseluruh wilayah Batavia. Selain orang-orang dari Nusantara, juga terdapat beberapa etnis lain yang berasal dari luar Nusantara, selain tentunya orang Eropa (Belanda) seperti Arab, China, Jepang, India yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kedatangan orang-orang asing ke Nusantara, khususnya di Batavia saat itu tidak lain adalah untuk berdagang dan membuka lahan pertanian dan perkebunan, hasil dari

penerapan UU Agraria (*Agrarische wet*) tahun 1870 yang memperbolehkan orang-orang asing (investasi) asing untuk masuk kedalam Nusantara membuka lahan industri pertanian dan perkebunan.

Kebijakan Kolonial Terhadap Industri Gula di Batavia Abad ke-18

Pasar internasional pada akhir abad ke-17 menunjukkan perubahan permintaan dalam hal jenis komoditi perdagangan, dimana gejala tersebut terwujud dalam bentuk penurunan permintaan terhadap komoditi rempah-rempah. Penurunan dan perubahan permintaan terhadap komoditi rempah-rempah, bukan hanya terjadi karena *over* produksi komoditi rempah-rempah, akan tetapi juga dikarenakan munculnya satu komoditi perdagangan yang menjadi primadona baru, yakni gula. Permintaan terhadap komoditi gula di pasar internasional, memaksa para wilayah-wilayah di Asia khususnya di Nusantara, penguasa lokal dan VOC bersepakat untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah dengan jalan membakarnya.

Pemusnahan terhadap tanaman rempah-rempah di beberapa wilayah di Nusantara, seperti yang terjadi di wilayah Maluku, dilakukan oleh VOC untuk menyelamatkan perekonomian VOC. Pemusnahan tanaman rempah-rempah tidak hanya akan meredam menurunnya suplai di pasaran internasional, akan tetapi mencoba untuk menanam tanaman komoditi lainnya seperti kelapa, karet, teh dan lainnya. Upaya lainnya yang dilakukan oleh VOC guna membangun produksi gula di wilayah kekuasaannya khususnya di Batavia, yakni dengan mendatangkan para tenaga terampil yang berasal dari Cina. Fenomena inilah yang dikatakan oleh Susan Blackburn sebagai upaya membangun Batavia dengan bantuan orang-orang Cina (Blackburn, 2011: 33).

VOC berupaya merangkul orang-orang Cina untuk datang dan membantu VOC untuk membangun Batavia, dengan jalan memberikan memerikan para tokoh Cina jabatan sebagai kapiten dan letnan (Suratminto, 2004: 16). Upaya ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kesadaran pemimpin VOC, bahwa orang-orang Cina telah lama berdagang dan bermukim di wilayah Jayakarta. Kemampuan orang-orang Cina ini pula yang mengantarkan terbukanya pintu bagi orang-orang Cina untuk masuk ke

Batavia, dan sebagian wilayah pedalaman di Batavia. Fenomena ini pula yang mungkin saja secara tepat dijelaskan oleh Leonard Blusse sebagai persekutuan aneh antara penguasa Eropa dengan etnis Tionghoa di Batavia (Blusse, 2004: xii).

Masuknya para imigran yang datang secara bergelombang ke wilayah Batavia sebagai konsekuensi dari kesepemahaman antara penguasa VOC dengan tokoh-tokoh etnis Tionghoa memberikan dampak terhadap bertambahnya jumlah populasi orang-orang Cina di Batavia. Blackburn (2011: 36) menjelaskan bahwa pada tahun 1674 orang-orang Cina yang tinggal di wilayah Batavia sebanyak 2.747 orang, dan pada tahun 1739 jumlah mereka meningkat pesat hingga mencapai angka 4.389 orang. Pertumbuhan populasi imigran Cina ini pula yang kemudian menuntut adanya pembukaan wilayah-wilayah baru untuk bermukim dan berusaha bagi mereka, kebutuhan tempat-tempat peribadatan dan lain sebagainya. Bahka mungkin pula pertumbuhan populasi ini, yang kelak juga akan menjadi salah satu faktor bagi meletusnya perlawanan/ pemberontakan orang-orang Cina dipenghujung abad ke-17.

Kehadiran tenaga-tenaga terampil dalam membangun produksi gula di Batavia, telah memberikan jalan bagi VOC untuk mempercepat usaha tersebut dengan jalan menetapkan kebijakan mengenai kependudukan (demografi) dan ketentuan-ketentuan mengenai sistem sewa tanah. Langkah-langkah yang ditempuh oleh VOC dalam menyusun produksi gula pertamanya ialah dengan membuka lahan seluas-luasnya di sekitar daerah terluar Batavia (*Omenlanden*). Wilayah di sekitar luar Batavia merupakan daerah yang kemudian dilakukan sistem sewa tanah, dengan peraturan yang cukup mengikat. Terjadi tiga hubungan yang mendasar dalam sistem sewa tanah tersebut, antara lain VOC, Pengusaha Cina dan Penduduk Pribumi.

Segi tiga hubungan relasi produksi tersebut, merupakan jenis pola relasi yang sangat bertolak belakang dengan pola relasi produksi dari sistem ekonomi kapitalisme di Eropa. Pada model atau pola hubungan relasi di Eropa, hubungan produksi hanya terjadi antara pengusaha dan kaum buruh, sementara itu kelompok aristokrat menjadi fasilitator dan melindungi aktivitas ekonomi yang berjalan. Pada titik inilah kita dapat memahami bahwa dalam usaha untuk membangun produksi dan industrialisasi awal komoditi gula di Batavia,

terdapat peran yang cukup besar dari kalangan pengusaha Eropa dan China. Dua kelompok inilah yang menjadi pilar utama dalam merealisasikan penyelenggaraan usaha gula di Batavia, meskipun bukanlah satu hal mudah untuk diketahui siapa yang memiliki ide awal dan berusaha untuk membudi-dayakan tanaman tebu di Batavia.

Pembukaan wilayah luar Batavia tersebut sebagai wilayah pertanian dan perkebunan tebu untuk industri gula di Batavia, memberikan konsekuensi berupa pertambahan jumlah etnis Tionghoa yang masuk kedalam wilayah Batavia, sehingga hal ini memunculkan kecemasan bagi pemimpin VOC. Meskipun dilain sisi masuknya etnis Tionghoa kedalam wilayah Batavia juga memberikan keuntungan bagi pemerintah VOC dalam bentuk pemungutan pajak dan penugasan penjagaan ketertiban. Kepada para tokoh-tokoh Cina yang telah memberikan jasa kepada VOC, pemerintahan VOC memberikan atau memudahkan para tokoh-tokoh tersebut untuk membeli tanah dan menyewa tanah di Batavia (Yudisthira, Tempat dan Waktu tidak diketahui).

Tanah-tanah yang di dapatkan oleh orang-orang Cina tersebut melalui praktek jual-beli ataupun sewa dari VOC, dipergunakan oleh orang-orang Cina tersebut untuk membangun perkebunan tebu, sebagian dipergunakan untuk menanam padi dan jenis umbi-umbian lainnya. Selain berprofesi sebagai pemilik tanah tersebut, orang-orang Cina juga memiliki profesi lainnya, yakni sebagai tukang kayu, dan pembuat arak (Suratminto, 2004: 12). Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia bagi produksi gula di Batavia yang dilakukan oleh etnis Tionghoa, sistem sewa tanah telah menopang kebutuhan sumber daya manusia tersebut. Berdasarkan sistem sewa tanah secara umum yang berlaku sejak masa VOC hingga masa pemerintahan kolonial kelak, dalam sistem sewa tanah para penduduk pribumi yang bermukim di atas tanah tersebut merupakan hak bagi sang penyewa tanah, digunakan untuk kepentingan penyewa tanah (sebagai petani penggarap).

Pada situasi yang berbeda, seandainya dalam tanah yang disewa oleh orang-orang Cina tersebut tidak terdapat penduduk pribumi yang bermukim, ataupun terjadi kekuarangan tenaga penggarap, pengusaha etnis Cina dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia melalui pasar tenaga kerja (jual-beli budak). Pasar jual-beli budak di Batavia terdapat di

wilayah *ommelanden*, diantaranya di kampung Pagaraman, Pekojan, Patuakan, Anke dan Gudang Panjang (Bonda Kanumuyoso dalam Titik Balik Historiografi Indonesia, 2008: 78). Wilayah-wilayah tersebut pada masa VOC merupakan wilayah yang terkenal sebagai sentra perdagangan budak di Batavia.

Seiring dengan dibukanya Batavia bagi kedatangan etnis Tionghoa, perlahan-lahan mulai dibukalah keran pembangunan industri gula di Batavia. Kedatangan etnis Tionghoa disisi lain sebagai upaya untuk menjadi Batavia sebagai bandar baru perdagangan di pesisir utara Jawa, juga dimanfaatkan pula oleh VOC sebagai tenaga terampil untuk mengelola perkebunan tebu di Batavia. Menghadapi pertumbuhan dan perkembangan industri gula di Batavia, tidak dapat dipisahkan pula peran dari kelompok lainnya yakni kelompok pribumi baik yang sejak lama bermukim di Batavia maupun yang menjadi pendatang menetap maupun temporal. Secara umum mungkin tidak terlalu sulit untuk menjelaskan dimana peran dan posisi dari kelompok masyarakat pribumi dalam sektor industri gula di Batavia (sebagai tenaga kerja dan pemasok tenaga kerja), akan tetapi peran dan posisi yang dimainkan terbilang cukup strategis dan determinan.

Berkaitan dengan posisi dari kelompok pribumi dalam produksi gula di Batavia, kelompok pribumi diposisikan sebagai tenaga kerja dalam produksi tersebut. Wujud konkrit jenis pekerjaan tersebut adalah menjadi buruh dalam penanaman tebu, dimana secara khusus kemudian bertugas sebagai pemasok kayu bakar dalam industri penggilingan tebu dan melakukan pengeringan terhadap batang-batang tebu yang siap diolah setelah panen (Furnivall, 2009: 43). Semakin berkembangnya kebutuhan penopang industri gula di Batavia, maka semakin besar pula dibutuhkan spesialisasi pekerjaan lain, seperti para pencari kayu bakar, buruh angkut, buruh pengeringan tebu, buruh penjaga areal perkebunan selain para pekerja yang berada di dalam pabrik. Pencari kayu bakar, buruh angkut dan pengering merupakan jenis pekerjaan yang bisa di dapatkan oleh pribumi tanpa harus menjadi buruh dalam pabrik gula. Mengenai pendapatan yang di dapatkan oleh para pribumi yang berasal dari keberadaan industri gula di

Batavia, dalam penelitian ini tidak di dapatkan laporan pasti dan data yang berhasil dihimpun.

Sebagai gambaran penunjang mungkin dapat di pahami mengenai pendapatan masyarakat pribumi pada masa awal pembangunan industri gula di Batavia ini, akan sedikit membuat kita memiliki informasinya, berdasarkan laporan/ pernyataan yang diberikan oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai perkembangan industri gula di Batavia (Yudisthira, Tempat dan Waktu tidak diketahui). Furnivall menjelaskan bahwa pada tahun 1637 produksi gula menghasilkan 196 pikul, kemudian pada tahun 1653 menjadi 12.000 pikul. Lebih lanjut menurut Furnivall, budidaya gula cenderung meluas pada 1710 dengan jumlah pabrik yang mencapai 130 pabrik, dengan penghasilan hingga tahun 1779 mencapai 100.000 pikul panen (Furnivall, 2009: 43-44).

Sekiranya

melalui pertambahan jumlah hasil yang diraih dalam produksi gula di Batavia yang mencapai ratusan ribu pikul di akhir abad ke-18 memberikan kepada kita bahwa terjadi peningkatan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan para pribumi yang berasal dari industri gula di Batavia. Perubahan dan alternatif profesi yang bisa dilakukan oleh kelompok pribumi menjadi semakin bervariasi, para penduduk pribumi tidak hanya bergantung kepada profesi sebagai petani saja, akan tetapi juga bisa menjadi buruh pabrik, buruh angkut dan buruh pengereng pada pabrik-pabrik gula di Batavia.

Situasi dan Peristiwa Politik di Jawa Abad ke-18

Pada perjalanannya pembukaan industri gula di Batavia memang cukup menguntungkan bagi VOC, akan tetapi kemudian terjadi persoalan yang cukup serius dalam produksi gula tersebut. Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa cukup banyak tanah yang disewakan menjadi tanah partikelir dan diubah menjadi tempat penanaman tebu (Kartodirjo, 1993: 301). Keadaan tersebut disatu sisi memacu perkembangan dan peningkatan produksi dan keuntungan dari industri gula di Batavia, akan tetapi di sisi lain keadaan tersebut juga memberikan konsekuensi berupa semakin berkurangnya bahan bakar (kayu bakar) sebagai komponen utama pengolahan tebu menjadi gula, serta ketersediaan lahan tanah yang semakin

menipis dan berkurang (terdapat pula kasus penanaman tebu di wilayah tandus, kurang subur dan mengakibatkan kerugian).

Peristiwa Geger Pecinan

Peristiwa perlawanan etnis Tionghoa di Batavia ini merupakan sebuah peristiwa yang cukup unik jika ditinjau melalui perspektif multidimensional. sebuah pertanyaan mendasar dapat kita kemukakan disini, mengapa peristiwa ini terjadi dan dilakukan oleh kelompok etnis Tionghoa, bukan oleh kelompok pribumi yang mengalami penghisapan (penindasan) yang cukup besar. Pertanyaan ini akan coba dijelaskan melalui penggambaran secara umum mengenai peristiwa pemberontakan orang Cina di Batavia pada tahun 1740. Hubungan dagang antara VOC dengan etnis Tionghoa sudah terjalin cukup lama dan jauh sebelum VOC masuk dan berkuasa di wilayah Batavia. Pertemuan dengan etnis Tionghoa secara menetap mulai berlangsung ketika pimpinan VOC di Batavia saat itu J.P. Coen memberikan tawaran bagi para pedagang Cina untuk melakukan aktivitas perdagangan di kota Batavia, hal tersebut dilandasi oleh motif keuntungan perdagangan yang bisa di dapatkan oleh VOC. Sartono menjelaskannya sebagai politik "*pintu terbuka*", dan kebijakan tersebut dilakukan pada saat hubungan politik antara VOC dan Banten sedang memanas (Kartodirjo, 1993: 220).

Pada tahun 1705 permintaan pasar internasional terhadap komoditi perdagangan gula semakin meningkat, dan hal ini semakin menambah daftar panjang masuknya imigran Cina kedalam wilayah Batavia. Semakin berkembangnya populasi etnis Tionghoa di Batavia pada tahun 1739 sebanyak 10.574 orang memberikan konsekuensi berupa persediaan lahan tempat tinggal dan lapangan pekerjaan semakin menyempit. Pada tahun 1739, etnis Tionghoa yang datang merupakan kelompok pendatang yang tidak memiliki kecakapan bekerja, mereka melakukan perbuatan kasar, pencurian, penipuan dan tindakan tidak terpuji lainnya (Vermeulen dalam Lilie Suratminto, 2004: 16).

Keadaan sosial yang semakin tidak tertib dan cenderung mengarah kepada distabilitas ini semakin bertambah kacau pada saat harga gula di pasar internasional menurun (tahun 1722). Merosotnya harga komoditi gula di pasar internasional, memberikan efek kejut yang cukup

besar bagi keuangan VOC. Menurut Sartono Kartodirjo (1993: 221) pada akhir tahun tiga puluhan (Abad XVIII) VOC mengalami kemunduran, beban keuangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Batavia jauh melampaui penerimaan, ada defisit terus-menerus. Hal ini direspon dengan kebijakan VOC yang memberlakukan para penduduk etnis Tionghoa untuk memiliki surat lisensi dengan membayar dua ringgit. Pendataan terhadap etnis Tionghoa dan memberlakukan penangkapan terhadap orang-orang Cina yang tidak memiliki lisensi dilakukan oleh pemerintah VOC hingga tahun 1740. Proses penangkapan yang cukup besar dilakukan pada saat terjadi perayaan Imlek di Tanjung Priuk dan Bekasi, sebanyak kurang lebih 1000 orang ditangkap dan kemudian diangkut dan di deportasi ke wilayah Sialan (Kartodirjo, 1993: 222).

Kejatuhan komoditi gula di pasar internasional, peningkatan jumlah penduduk dalam kehidupan sosial di Batavia, serta perilaku (budaya) politik pemerintah VOC yang cenderung pragmatis menghadapi persoalan sosial-ekonomi menjadi semacam pemantik bagi terciptanya satu momentum peristiwa di Batavia. Maka pada tanggal 9 Oktober 1974 meletuslah peristiwa tragedi Angke. Pagi hari sekitar pukul 8 pagi para pemberontak Cina berkumpul di gerbang kota Batavia untuk melakukan protes, akan tetapi dibawah pimpinan anggota *Raad van Indie* (Dewan Hindia) von Imhoff dan van Aerden, para pemberontak berhasil dikalahkan dengan bantuan persenjataan meriam-meriam Belanda (Yudisthira, Tempat dan Waktu tidak diketahui).

Selain membunuh para etnis Tionghoa yang melakukan penyerbuan ke pintu gerbang kota Batavia, pemerintah VOC juga melakukan penangkapan kepada orang-orang Cina yang masih hidup dan mendeportasi mereka ke Ceylon (Suratminto, 2004: 21). Usaha lain juga dilakukan dengan melakukan pengejaran terhadap para kelompok pemberontak yang melarikan diri ke wilayah lain diluar Batavia (Kartodirjo, 1993: 224). Sejak tanggal 22 Oktober 1740, Gubernur Jendral Adrian Valckenier menyatakan bahwa kondisi di dalam kota sudah aman dari peristiwa yang cukup besar tersebut (Yudisthira, Tempat dan Waktu tidak diketahui).

Sejak peristiwa tersebut berlangsung keadaan ekonomi di Batavia mengalami kemunduran, diakibatkan oleh berhentinya

perdagangan kota. Bagi para penduduk Cina yang masih bertahan dalam kota Batavia, dan tidak terlibat dengan pemberontakan masih menutuo toko-toko kelontong mereka, karena takut dengan kebijakan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah VOC. Sementara itu banyak juga toko-toko yang ditinggalkan oleh orang-orang Cina yang terlibat dalam pemberontakan. Kejadian ini juga memberikan dampak yang cukup besar bagi perkebunan dan pabrik tebu yang berada di Batavia, dilaporkan bahwa kejadian tersebut telah membunuh beberapa pabrik gula, dengan cara di bakar.

Menurut Vermuelen akibat perusakan dan pembakaran pabrik gula tersebut, hanya tersisa 82 pabrik dari 130 pabrik yang pernah beroperasi. 82 pabrik tersebut kembali digunakan dan diberikan kepada orang-orang Cina yang tidak terlibat pemberontakan untuk melakukan usaha produksi gula kembali. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gula di negeri Belanda yang mencapai konsumsi sebesar 7.821.144 pound. Sementara itu dari 82 pabrik yang masih dapat dioperasikan kembali, mampu memproduksi gula sebanyak 8.000.000 pound (Yudisthira, tempat dan waktu tidak diketahui). Keadaan yang demikian sempat membuat jatuh penerimaan dan pendapatan VOC dari sektor komoditi gula, akan tetapi peristiwa tersebut memberikan hal positif pula bagi VOC berkaitan dengan produksi gula, tingkat konsumsi gula di kota Batavia berkurang, meskipun tidak didapatkan laporan resmi dan jumlahnya, berkurangnya penduduk di Batavia, akibat pembunuhan dan deportasi yang dilakukan terhadap warga Cina, membuat pengurangan jumlah konsumsi gula untuk produksi arak

Mataram (Pakubuwono II melawan VOC)

Peristiwa perlawanan etnis Tionghoa di Batavia memberikan satu konsekuensi panjang bagi upaya pemulihan keamanan di sekitar wilayah Batavia dan wilayah lainnya di pulau Jawa, yang bersinggungan dengan kepentingan VOC seperti Semarang dan Surabaya. Peristiwa geger pecinan atau sebagai menyebutkan sebagai tragedi Angke, seolah-olah menyulut permasalahan sebelumnya yakni perang antara Sultan Agung dari Mataram dengan pihak VOC di Batavia. Sunan Paku Buwana II (selanjutnya akan disingkat menjadi PB II) melakukan perlawanan terhadap VOC dengan memberikan

bantuan kepada para pemberontak, di wilayah Semarang dan Surabaya.

Setelah pemberontakan yang terjadi di wilayah Semarang dan Surabaya dapat di atasi oleh pemerintah VOC, kemudian memaksa PB. II untuk berhadapan secara langsung dengan VOC. Keadaan ini semakin membuat PB. II kesulitan, dikarenakan pihak pemerintah VOC, memberikan informasi kepada PB. II mengenai rencana kudeta yang akan dilakukan oleh para pangeran lainnya yang sudah terbuang terhadap kekuasaan yang dimiliki PB. II. Keadaan inilah yang kemudian membuat PB. II untuk kembali berunding dan mengikat kerjasama dengan pemerintah VOC, serta melakukan pembersihan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said (Ricklefs, 2011: 147).

Perlawanan yang dilakukan oleh Raden Mas Said, merupakan perlawanan yang dilakukan kepada PB. II untuk mengkritisi ketidak konsistenan PB. II terhadap perlawanan kepada VOC. Raden Mas Said adalah putra PB. I, tidak lain adalah kemenakan PB. II, yang bergabung dengan pemberontak Cina melawan VOC atas titah sang paman (PB. II). Setelah pemberontakan selesai, Raden Mas Said tidak kembali ke Keraton, akan tetapi mundur ke daerah Sukawati (sebelah timur Sala sampai lereng Gunung Lawu). Dari daerah itu Raden Mas Said melakukan perlawanan terhadap PB. II, sementara itu di lain sisi PB. II meminta bantuan kepada Pangeran Mangkubumi untuk meredam perlawanan terhadap pemberontakan Raden Mas Said, dan dijanjikan akan diberikan wilayah Sala hingga lereng Gunung Lawu kepada Pangeran Mangkubumi (Ricklefs, 2011: 146).

Pangeran Mangkubumi pada akhirnya dapat menangkap Raden Mas Said, dalam satu dialog Raden Mas Said bertanya kepada Pangeran Mangkubumi, bagaimana seorang Pangeran dapat menjadi dan membantu seorang Raja yang tidak memiliki konsistensi. Sebelum menyerahkannya Raden Mas Said kepada PB. II, Pangeran Mangkubumi menghadap PB. II dalam satu jamuan acara, yang juga di hadiri oleh pimpinan VOC. Pada pertemuan tersebut, PB. II mengatakan bahwa tanah lungguh yang akan diberikan melampaui batas dan diturunkan menjadi seribu cacah (Kartodirjo, 1993: 230).

Selepas pertemuan tersebut, Pangeran Mangkubumi meninggalkan Keraton dan tidak memberikan Raden Mas Said kepada PB. II. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said bersatu dan membangun aliansi untuk

menghadapi PB. II dari daerah Sukawati. Pemberontakan dan perlawanan terhadap PB. II semakin besar, dan ini dianggap sebagai fakta atas upaya kudeta yang akan dilakukan oleh para pangeran lain terhadap kekuasaan PB. II. Pada perkembangannya PB. II meminta bantuan kepada VOC untuk mengamankan kekuasaannya dan menjaga tahta kerajaan bagi anaknya yakni PB. III. Sebelum wafat PB. II membuat perjanjian dengan VOC, bahwa VOC akan membantu PB. II untuk menumpas perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, serta melakukan penjagaan dan perlindungan terhadap proses suksesi PB. III menuju tahta Kerajaan Mataram (Ricklefs, 2011: 148). Perjanjian tersebut juga disertai dengan kompensasi diberikannya kekuasaan atau vasal Mataram yakni wilayah Priangan dan sebagian wilayah Jawa bagian Timur kepada VOC, sebagai imbalan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

Selain pemberian wilayah tersebut, PB II juga berjanji agar raja selanjutnya mengutamakan perjanjian dengan pihak VOC, bilamana mana akan naik tahta dan di dahului dengan kesepakatan perjanjian sebelum naik tahta. Mendengar perjanjian yang dilakukan oleh PB. II dengan pemerintah VOC, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said semakin gencar melakukan perlawanan. Perlawanan yang berangsur cukup lama membuat VOC berfikir keras untuk dapat menertibkan keadaan, maka dilangsungkalah mediasi antara VOC, perwakilan Susuhunan Mataram dengan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Perjanjian tersebut berlangsung pada 12 Februari 1755, di sebuah desa yang bernama desa Giyanti (Kartodirjo, 1993: 233).

Melalui serangkaian peristiwa politik tersebut, VOC sudah hampir menguasai sebagian pulau Jawa yang didapatkan melalui keterlibatan VOC dalam peristiwa suksesi pemimpin lokal di Jawa (Mataram). Luasnya daerah kekuasaan dan manajemen yang kurang baik, membuat VOC menghadapi masa akhir dari kekuasaannya, ditambah pula dengan masuknya imperium Inggris ke wilayah VOC dan kemudian memegang penuh kontrol dan kekuasaan di Hindia-Belanda, khususnya di Jawa. Keadaan-keadaan yang demikian membuat VOC semakin terpuruk dan membuat pemerintahan Kerajaan Belanda di Negeri induk mengambil kebijakan membubarkan VOC dan menggantikannya dengan perwakilan resmi Kerajaan Belanda

dibawah pengawasan Menteri Tanah Jajahan. Dengan berakhirnya kekuasaan VOC, maka berakhir pula penanaman tebu yang hanya tersentral di Batavia, hal ini dilakukan dengan semakin luas dan besarnya kekuasaan pemerintah kolonial Hindia-Belanda, hasil dari peristiwa suksesi pemimpin lokal di Jawa.

PENUTUP

Permintaan terhadap komoditi gula di pasar internasional, memaksa para wilayah-wilayah di Asia khususnya di Nusantara, penguasa lokal dan VOC bersepakat untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah dengan jalan membakarnya. Pemusnahan terhadap tanaman rempah-rempah di beberapa wilayah di Nusantara, seperti yang terjadi di wilayah Maluku, dilakukan oleh VOC untuk menyelamatkan perekonomian VOC. Pemusnahan tanaman rempah-rempah tidak hanya akan meredam menurunnya suplai di pasaran internasional, akan tetapi mencoba untuk menanam tanaman komoditi lainnya seperti kelapa, karet, teh dan lainnya. Upaya lainnya yang dilakukan oleh VOC guna membangun produksi gula di wilayah kekuasaannya khususnya di Batavia, yakni dengan mendatangkan para tenaga terampil yang berasal dari Cina. Fenomena inilah yang dikatakan oleh Susan Blackburn sebagai upaya membangun Batavia dengan bantuan orang-orang Cina. VOC berupaya merangkul orang-orang Cina untuk datang dan membantu VOC untuk membangun Batavia, dengan jalan memberikan memerikan para tokoh Cina jabatan sebagai kapiten dan letnan. Upaya ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari kesadaran pemimpin VOC, bahwa orang-orang Cina telah lama berdagang dan bermukim di wilayah Jayakarta. Kemampuan orang-orang Cina ini pula yang mengantarkan terbukanya pintu bagi orang-orang Cina untuk masuk ke Batavia, dan sebagian wilayah pedalaman di Batavia.

Kedatangan etnis Tionghoa ke wilayah Batavia, memicu pembukaan industri gula secara besar-besaran, dan selama beroperasi industri gula di Batavia telah cukup banyak menghasilkan pendapatan bagi VOC, dimana data terakhir sebelum VOC di bubarkan pada tahun 1795 pendapatan tersebut setelah dikonversi menjadi mata uang gulden mencapai 190.000 gulden pada tahun 1795. Pendapatan tersebut dihasilkan dari penanaman gula yang berada diwilayah Batavia,

Cheribon dan pedalaman Jawa lainnya (hasil penanaman Tebu di Batavia menurut Raffles mencapai 6.000.000 pon).

Pada perjalanannya pembukaan industri gula di Batavia memang cukup menguntungkan bagi VOC, akan tetapi kemudian terjadi persoalan yang cukup serius dalam produksi gula tersebut. Sartono Kartodirjo menjelaskan bahwa cukup banyak tanah yang disewakan menjadi tanah partikelir dan diubah menjadi tempat penanaman tebu.

Keadaan tersebut disatu sisi memacu perkembangan dan peningkatan produksi dan keuntungan dari industri gula di Batavia, akan tetapi di sisi lain keadaan tersebut juga memberikan konsekuensi berupa semakin berkurangnya bahan bakar (kayu bakar) sebagai komponen utama pengolahan tebu menjadi gula, serta ketersediaan lahan tanah yang semakin menipis dan berkurang (terdapat pula kasus penanaman tebu di wilayah tandus, kurang subur dan mengakibatkan kerugian).

DAFTAR PUSTAKA

- Abeyasekere, Susane. 1989. *Jakarta a History*. Oxford University Press : Singapore.
- Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Masup. Jakarta.
- Blusse, Leonard. 2004. *Persekutuan Aneh : Pemukiman Cina, Wanita Peranakan, dan Belanda di Batavia VOC*. LKIS. Jakarta.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia-Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Freedom Institute Jakarta.
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru : 1500-1900 Dari Emporium sampai Imperium*. Gramedia. Jakarta.
- Marihandono, Djoko (penyunting). 2008. *Titik Balik Historiografi Indonesia*. Wedatama Widya Sastra. Jakarta.
- Ricklefs, M.C. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suratminto, Lilie. 2004. *Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740*. Jurnal Wacana, Vol. 6 No.1, April. Jakarta.
- Yudisthira, Ardi dkk. *Pengaruh Terjadinya Tragedi Angke Tahun 1740 Terhadap Bidang Sosial-Ekonomi di Batavia*. (Tempat dan waktu tidak diketahui).

